

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN (ORIGINALITAS) PENELITIAN.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teoritis.....	14
1. Teori Pidana dan Penjatuhan Pidana.....	14
2. Teori Penegakan Hukum.....	20
3. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	28
G. Metode Penelitian.....	35
1. Metode Pendekatan.....	35

2. Spesifikasi Penelitian	35
3. Jenis dan Sumber Data.....	37
a. Data Primer	37
b. Data Sekunder.....	38
4. Metode Pengumpulan Data.....	39
5. Lokasi Penelitian.....	41
6. Metode Analisis Data.....	41
BAB II	44
A. Tinjauanj Umum tentang Mahkamah Konstitusi.....	44
1. Tinjauan tentang Sejarah Mahkamah Konstitusi.....	44
2. Tinjauan tentang Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	56
B. Tinjauan tentang Presiden/ Kepala Negara.....	67
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	71
1. Pengertian Tindak Pidana.	71
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana.	74
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana.....	79
4. Pembagian Tindak Pidana menurut Kepentingan Hukumnya.....	80
D. Tindak Pidana Penghinaan	82
1. Unsur Obyektif dan Subyektif penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP.....	82
2. Unsur Obyektif dan Subyektif penghinaan	

	terhadap Presiden dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik.....	91
BAB III		108
A.	Dampak Yuridis dari Penghapusan Pasal Tindak Pidana Penghinaan Presiden Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 serta Pertimbangan Hukum dari Hakim Mahkamah Konstitusi Atas Putusan Tersebut.....	108
1.	Dampak Yuridis dari Penghapusan Pasal Tindak Pidana Penghinaan Presiden Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006....	108
2.	Pertimbangan Hukum dari Hakim Mahkamah Konstitusi Atas Putusan Tersebut.....	131
B.	Posisi Kasus Penghinaan Presiden pada Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 47/ Pid. Sus/2017/PN.Blora dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tersebut.....	144
1.	Posisi Kasus Penghinaan Presiden pada Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 47/ Pid. Sus/2017/PN.Blora.....	144
2.	Pertimbangan Hakim dalam Perkara tersebut.....	158

C. Eksistensi Pasal Penghinaan Presiden di Masa yang akan Datang, Dikaitkan dengan Makin Maraknya Media Sosial.....	166
BAB IV	175
Penutup	176
Saran	177
Simpulan	178
DAFTAR PUSTAKA	179
LAMPIRAN-LAMPIRAN	180